

## Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan

Supriadin<sup>1\*</sup>, Wardan<sup>2</sup><sup>1,2</sup> Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Mataram, Indonesia\*Email: [supriadin005@gmail.com](mailto:supriadin005@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah pedesaan. Dana desa, sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah, dirancang untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa desa sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa secara optimal mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, pengelolaan dana yang belum transparan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan pelatihan bagi aparatur desa, penguatan pengawasan penggunaan dana, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan pengelolaan yang tepat, dana desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan di pedesaan

Copyright © 2024, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



### Article History

Received 2024-10-27

Revised 2024-10-29

Accepted 2024-11-11

### Keywords

Dana Desa,  
Pembangunan  
Ekonomi,  
Infrastruktur  
Pedesaan

## PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan memegang peranan penting dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis pemerintah Indonesia adalah melalui alokasi dana desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat kapasitas desa sebagai unit pemerintahan terdepan. Menurut Suyanto (2016). Dana desa menjadi salah satu instrumen kunci untuk mendorong desa-desa di Indonesia mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.

Meski demikian, pengelolaan dana desa tidak lepas dari tantangan. Berbagai kendala, seperti kurangnya kompetensi aparatur desa, lemahnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, menjadi isu yang sering mengemuka. Sutoro Eko (2015) menyatakan bahwa, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola program yang dirancang. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur pedesaan menjadi komponen vital yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan desa, irigasi, dan fasilitas publik lainnya, dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Adisasmita (2014), pembangunan infrastruktur yang baik di desa memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang tepat berpotensi mengatasi kesenjangan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. Dana desa telah terbukti

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, dan fasilitas sanitasi, yang sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat (Dewi,2021). Pembangunan infrastruktur yang didanai oleh dana desa tidak hanya meningkatkan mobilitas penduduk, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui perbaikan akses ke pasar dan distribusi barang, yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Sutrisno, 2018). Penelitian ini sejalan dengan pandangan Habibie (2020) yang menyatakan bahwa “pengelolaan dana desa yang transparan dan berbasis kebutuhan lokal menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan

Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah keterbatasan kapasitas administrasi dan pengawasan yang dimiliki oleh aparatur desa, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengelola dana secara optimal. Keterbatasan ini mencakup kurangnya pemahaman mendalam tentang peraturan pengelolaan dana desa, kelemahan dalam merencanakan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta minimnya keterampilan teknis dalam melaksanakan dan memantau proyek pembangunan. Akibatnya, efektivitas penggunaan dana desa sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian oleh Tumbel (2017) mengungkapkan bahwa kurangnya keterampilan teknis aparatur desa dalam merencanakan dan mengelola proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa kerap mengakibatkan ketidaktepatan sasaran, ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana. Selain itu, kendala lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Rendahnya keterlibatan masyarakat ini sering menyebabkan program pembangunan yang dilaksanakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas lokal, sehingga menurunkan relevansi dan keberlanjutan program. Sebagaimana disampaikan oleh Eko (2015), partisipasi masyarakat yang minim dalam tahapan perencanaan dan pengawasan berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan desa, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas dan dampak positif dari penggunaan dana desa.

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana desa, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai manajemen dana serta pengelolaan proyek pembangunan, sebagaimana disarankan oleh Sutrisno (2018). Pelatihan ini diharapkan tidak hanya mencakup aspek teknis seperti perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan, tetapi juga memperkuat kemampuan aparatur desa dalam berkomunikasi dan melibatkan masyarakat secara efektif. Selain itu, upaya ini perlu diimbangi dengan dorongan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dengan demikian, program-program pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, serta mencerminkan aspirasi dan prioritas lokal.

Sebagaimana dicontohkan oleh penelitian Tumbel (2017), tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa terbukti mampu mendorong terciptanya pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya memberikan manfaat berupa pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan warga desa, yang pada gilirannya meningkatkan keberlanjutan program-program pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Nasution (2018), yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hasil pembangunan, karena masyarakat memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan lokal dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan desa

---

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat, serta observasi langsung terhadap implementasi proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Menurut Sugiyono (2016), wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjek penelitian, sementara observasi langsung memberikan gambaran yang lebih nyata tentang dampak dari penggunaan dana desa di lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data (Miles & Huberman, 1994).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemanfaatan dana desa terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, sebagaimana diungkapkan oleh Adisasmita (2014) bahwa "Infrastruktur yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat." Pembangunan jalan desa, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang didanai oleh dana desa telah memperbaiki aksesibilitas masyarakat untuk menuju pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan (Eko, 2015). Hasil ini menunjukkan bahwa dana desa berhasil menjadi alat untuk memecahkan tantangan mobilitas yang selama ini dihadapi masyarakat pedesaan (Habibie, 2020).

Selain infrastruktur, dana desa juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi. Langkah ini mencakup pembangunan toilet umum, saluran air bersih, dan tempat pembuangan sampah, sebagaimana diungkapkan oleh Sutrisno (2018). Menurut Eko (2015), sanitasi yang baik memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif, sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Habibie (2020) mencatat bahwa peningkatan fasilitas sanitasi ini telah memberikan dampak signifikan, terutama dengan menurunkan angka kejadian penyakit yang berkaitan dengan lingkungan tidak higienis, seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan infeksi kulit. Selain itu, Suyanto (2016) menemukan bahwa manfaat dari pembangunan sanitasi tidak hanya dirasakan secara umum, tetapi juga secara langsung oleh masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan anak-anak dan ibu hamil, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap dampak buruk sanitasi yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa program peningkatan fasilitas sanitasi melalui dana desa berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Program dana desa juga memberikan dukungan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemberian modal usaha kecil (Eko, 2015). Sutrisno (2018) menjelaskan bahwa pelatihan kewirausahaan yang didukung dana desa mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha lokal, seperti pengolahan hasil tani dan kerajinan tangan. Program ini berhasil menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa (Suyanto, 2016). Selain itu, usaha-usaha mikro ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga mengurangi angka kemiskinan (Habibie, 2020).

Namun, meskipun manfaatnya jelas, pengelolaan dana desa masih menghadapi beberapa tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan (Eko, 2015). Menurut Habibie (2020), "Kapasitas yang terbatas sering kali menyebabkan ketidaktepatan penggunaan dana desa, sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai." Kondisi ini juga diperburuk oleh kurangnya pengawasan yang memadai dari pihak terkait (Sutrisno, 2018).

Masalah lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek yang dibiayai oleh dana desa (Tumbel, 2017). Adisasmita (2014) mencatat bahwa "Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat." Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa desa, masyarakat

merasa kurang dilibatkan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan nyata masyarakat dan program yang dilaksanakan (Eko, 2015).

Solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa melibatkan berbagai pendekatan strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa dan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan dan pendampingan teknis yang komprehensif, seperti yang diusulkan oleh Habibie (2020). Pelatihan ini harus dirancang secara terarah dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa aparatur desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola dana desa dengan akuntabilitas dan efektivitas yang tinggi. Sutrisno (2018) menegaskan bahwa pelatihan yang terstruktur tidak hanya akan membantu meningkatkan kompetensi teknis aparatur desa, tetapi juga akan memperkuat tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan komponen penting yang tidak boleh diabaikan. Suyanto (2016) menyatakan bahwa "Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa." Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, akan memastikan bahwa program-program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi program, tetapi juga menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan. Sebagaimana diungkapkan oleh Soetomo (2008), partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan elemen fundamental untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan membuka ruang dialog dan melibatkan berbagai pihak, desa dapat menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong inovasi, pengawasan yang lebih baik, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. Kombinasi antara kapasitas aparatur desa yang meningkat dan partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjadi dasar yang kokoh untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di pedesaan (Eko, 2015). Dana desa telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, seperti yang terlihat dalam peningkatan aksesibilitas, fasilitas sanitasi, dan program pelatihan kewirausahaan. Infrastruktur yang dibangun dengan dana desa, seperti jalan desa dan jembatan, telah meningkatkan mobilitas penduduk dan barang, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Habibie, 2020). Dengan demikian, dana desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembangunan fisik, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, untuk mencapai manfaat yang optimal dari pemanfaatan dana desa, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan (Habibie, 2020). Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa sering kali menjadi kendala utama yang dapat menghambat efektivitas penggunaannya, berpotensi mengakibatkan ketidaktepatan sasaran bahkan penyimpangan. Hal ini menekankan pentingnya program pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa untuk memperkuat kompetensi mereka, sehingga dana desa dapat dikelola secara efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan perlu ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif yang inklusif. Dengan cara ini, pembangunan desa dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat serta mampu memberdayakan potensi lokal. Pemanfaatan dana desa memainkan peran strategis dalam mendorong kemajuan pedesaan, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Putra, Sahri, & Basuki, 2024)

Dengan demikian, dana desa memiliki potensi besar untuk menjadi alat strategis dalam mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing, sebagaimana dikemukakan oleh Adisasmita (2014). Implementasi pembangunan desa yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, serta didukung oleh pengelolaan yang transparan dan akuntabel, akan menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di kalangan masyarakat. Lebih jauh lagi, melalui penggunaan dana desa yang dikelola secara profesional dan berintegritas, yang diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, desa dapat memperkuat kemampuannya untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan mengoptimalkan potensi lokal dan menciptakan inovasi-inovasi yang relevan dengan kebutuhan global, desa dapat berkembang menjadi entitas yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warganya tetapi juga bersaing dalam konteks ekonomi dan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, melalui sinergi antara pengelolaan dana yang baik, partisipasi masyarakat yang inklusif, dan penguatan kapasitas aparatur desa, pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan daya saing desa dapat tercapai, menjadikan desa sebagai motor penggerak pembangunan nasional yang tangguh di era globalisasi.

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan dana desa telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Program ini telah menghasilkan berbagai capaian nyata, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas sanitasi, serta pelaksanaan program pemberdayaan usaha kecil dan pelatihan kewirausahaan. Semua inisiatif tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas, kualitas kesehatan, dan pendapatan masyarakat, yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan desa. Namun, meskipun manfaat yang dirasakan cukup luas, keberhasilan pemanfaatan dana desa masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana, lemahnya mekanisme pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan sering kali menghambat efektivitas program ini. Tantangan-tantangan ini dapat berujung pada ketidaktepatan sasaran, ketidakefisienan pengelolaan, dan potensi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Untuk mengoptimalkan potensi dana desa sebagai alat strategis pembangunan, diperlukan langkah-langkah konkret yang terintegrasi. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa perlu menjadi prioritas melalui pelatihan komprehensif yang mencakup manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan proyek. Kedua, mekanisme pengawasan harus diperkuat dengan melibatkan pihak eksternal, seperti auditor independen atau institusi pengawasan daerah, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, masyarakat desa perlu diberdayakan secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan melalui forum-forum musyawarah, sosialisasi yang efektif, serta pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, R. (2014). *Pembangunan Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, D. N. A. M. (2021). Dana desa mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi lokal desa di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 607–620.
- Eko, S. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Habibie, B. (2020). *Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications.

- 
- Nasution, M. (2018). *Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Indah.
- Putra, D. P., Sahri, S., & Basuki, P. (2024). Effectiveness of Village Fund Utilization in Supporting Rural Development (Case Study of Pundi Village, Soromandi Subdistrict, Bima Regency, West Nusa Tenggara). *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(7), July. DOI:[10.47191/jefms/v7-i7-33](https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i7-33)
- Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, B. (2018). *Manajemen Pembangunan Desa*. Malang: UMM Press.
- Suyanto, B. (2016). *Ekonomi Desa dan Kebijakan Dana Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.